

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Beni Hartanto

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: benihart1973@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Graha Persada Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif, dengan tujuan mengungkapkan secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Graha Persada Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dari Kepala Dusun, Ketua RW maupun Ketua RT memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sementara tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sedangkan komunikasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Graha Persada.

Kata kunci : Partisipasi dan perencanaan pembangunan

PENDAHULUAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Landasan ideologi yang melandasi pengelolaan keuangan desa adalah dua azas dalam pengaturan desa yaitu subsidiaritas dan rekognisi, penegasan azas tersebut tersebut membuat kedudukan dan kewenangan desa menjadi luas, terutama dalam mengatur pemerintah desa, pembangunan desa, pengembangan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan yang optimal. Partisipasi masyarakat merupakan kemauan yang timbul dari diri sendiri, artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan wilayahnya atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri sendiri. Agar pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karean hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan

memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dengan melalui partisipasi masyarakat bertujuan agar dalam proses pembangunannya sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Melalui partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, setiap permasalahan di lingkungannya terkait dengan program pembangunan desa dapat diselesaikan dengan baik. Semetara itu untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan perubahan suatu persepsi pemerintah dalam pembangunan serta untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat karena kritik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat.

Kesatuan antara penduduk, sumber daya alam, dan organisasi kelembagaan desa merupakan unsur paling utama dalam menentukan keberhasilan program pembangunan suatu wilayah atau desa, masyarakat merupakan sentral pembangunan karena dari masyarakat dan oleh masyarakatlah proses pembangunan dapat dilaksanakan. Selain itu keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan juga oleh sifat kemampuan dan keterampilan para pemimpin yang ada di desa dalam menggerakkan kegiatan pembangunan, pemimpin yang dapat membimbing dan membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya secara tidak langsung akan dapat merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan atau dengan kata lain masyarakat ingin berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Terdapat dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan desa yaitu partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, dan kedua masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi,

pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil.

Mengacu pada uraian di atas menunjukkan keberhasilan pembangunan ditentukan sejauhmana masyarakat dapat mengambil perannya dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya. Dalam perencanaan pembangunan di Dusun Graha Persada Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, untuk pembangunan Tahun Anggaran 2017 diketahui kurang melibatkan masyarakat Dusun Graha Persada dalam melakukan perencanaan pembangunannya.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Pengertian partisipasi dikemukakan Wazir (1999: 29) dengan mengartikan bahwa partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) mengemukakan bahwa: "Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi".

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang

- sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
 - d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting, hal tersebut sebagaimana dikemukakan Suryono (2001:124) dengan menyatakan “partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam memerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong

munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikemukakan oleh Hetifah (Handayani 2006: 39) menyatakan "Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal". Sementara menurut Histiraludin (Handayani 2006: 39-40) menyatakan "Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan".

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi "model baru" yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, karena peneliti akan mengungkapkan secara komprehensif bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Graha Persada Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang yang diminati dan memberikan data dan informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian dilakukan, yaitu sejak penelitian memasuki lapangan untuk mengumpulkan data hingga penarikan kesimpulan, karena dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Graha Persada merupakan sebuah Dusun Baru yang terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT), dengan pembagian RW 16 dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 5 RT, sedangkan RW 17 membawahi 6 RT. Jumlah penduduk dengan status penduduk tetap mencapai 893 orang, sementara jumlah Kepala Keluarga sebanyak 285 orang. Pembangunan di Dusun Graha Persada tidak terlepas dari peran Kepala Dusun dan pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Keadaan masyarakat di Dusun Graha Persada sebagian besar merupakan masyarakat dengan tingkat produktif, artinya memiliki pekerjaan atau sebagai pengusaha, sehingga hal tersebut menjadikan waktu yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam partisipasi pembangunan cukup sulit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dimana perencanaan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2017, Kepala Dusun Graha Persada telah secara aktif melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) maupun dengan masyarakat. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2018 ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2016, Kepala Dusun kurang melakukan komunikasi, sosialisasi maupun melakukan musyawarah dalam merencanakan pembangunan di Dusun Graha Persada.

Kepala Dusun sebagai pemimpin di Kedusunan Graha Persada memiliki peran penting dalam kelangsungan pembangunan di wilayah kerjanya, hal tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakannya pada tahun 2016 dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk merencanakan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan perencanaan pembangunan pada tahun tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Namun demikian pada tahun 2017, musyawarah untuk merencanakan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018, diketahui perencanaan pembangunan di dusun Graha Persada mengacu kepada rencana pada tahun sebelumnya yang belum terelaisasi. Adapun yang menjadi masalah dalam melakukan musyawarah dengan para pengurus RW, RT dan masyarakat terkendala masalah waktu dikarenakan kesibukan masing-masing, sehingga dalam proses perencanaan cukup sulit dilakukan, sehingga komunikasi dilakukan melalui media elektronik.

Kepala Dusun sendiri memiliki kedudukan sebagai perangkat Desa dengan tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian Kepala Dusun sebagai pemimpin di Kedusunan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya.

Seorang Kepala Dusun memiliki kewajiban melakukan koordinasi dengan perangkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) maupun masyarakatnya. Sebagai seorang pemimpin bagi pengurus RT/RW maupun masyarakat di tingkat

Kedusunan, selalu memandang Kepala Dusun memiliki peran penting dalam segala bidang kegiatan. Jadi penampilan dan kesan-kesan positif seorang Kepala Dusun akan memberikan gambaran yang positif pula terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya.

Sementara dari hasil wawancara dengan salah seorang Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat Dusun Graha Persada, disimpulkan untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2017, sampai saat ini belum ada musyawarah yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun, sementara masyarakat juga kurang memiliki partisipasi secara aktif tentang rencana pembangunan di wilayahnya, sementara kebutuhan pembangunan fisik sangat dibutuhkan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dari Kepala Dusun Graha Persada, para pengurus RW dan RT perlu ditingkatkan dalam melakukan sosialisasi, komunikasi dengan musyawarah. Sementara tokoh sentral yaitu Kepala Dusun sebagai perangkat Desa mempunyai tugas menampung aspirasi masyarakat, membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu lebih meningkatkan kemampuannya sebagai pemimpin di Dusun Graha Persada dengan lebih berperan aktif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya.

Partisipasi masyarakat selain dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, juga dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, baik pendidikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin maupun masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Kepala Dusun Graha Persada memiliki tingkat pendidikan tinggi, demikian pula dengan pengurus RW dan RT sebagian besar memiliki pendidikan tinggi, sementara masyarakat Dusun Graha Persada dengan pendidikan pada umumnya lulus minimal tingkat SLTA. Namun demikian partisipasi masyarakat masih kurang berperan aktif dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya, sementara tuntutan kebutuhan perbaikan fisik sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan tidak memiliki korelasi terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena dengan memiliki pendidikan tinggi tidak serta merta seseorang memiliki partisipasi tinggi ikut serta berperan dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya. Seyogyanya seseorang dengan memiliki pendidikan tinggi dapat meningkatkan partisipasi dirinya terhadap perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana lingkungan dimana tinggal.

Komunikasi memiliki peran sangat penting dalam berbagai bidang, karena tanpa adanya komunikasi, sebaik apapun program tidak akan berjalan dengan baik. Demikian halnya dengan kemampuan komunikasi bagi seorang pemimpin, komunikasi menjadi kunci keberhasilannya dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Komunikasi yang baik akan memudahkan seorang pimpinan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh Kepala Dusun Graha Persada sudah cukup baik, namun demikian kurang sampai kepada penerimanya. Hal tersebut dari

hasil pengamatan dan penelitian, komunikasi yang terjadi khususnya antara Kepala Dusun Graha Persada dengan pengurus RT dan RW sendiri kurang berjalan dengan baik secara langsung melalui pertemuan-pertemuan. Komunikasi yang dilaksanakan lebih sering melalui media telekomunikasi, sehingga perencanaan pembangunan kurang berjalan dengan efektif, dan kurang memberikan nilai-nilai aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa komunikasi dari Kepala Dusun Graha Persada masih perlu ditingkatkan dengan para pengurus tingkat RT dan RW serta masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih menyentuh kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada Tahun Anggaran 2018. Komunikasi sangat penting dalam berbagai bidang, sehingga komunikasi antara Kepala Dusun Graha Persada dengan para pengurus RT dan RW, maupun masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan di Dusun Graha Persada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Dusun Graha Persada memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di wilayah kerjanya. Sementara tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Graha Persada, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Sementara komunikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Dusun Graha Persada, karena dengan adanya komunikasi diantara unsur Pemerintah, pengurus tingkat RT/RW dan masyarakat, maka program pembangunan akan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- Mikkelsen, B., 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Wazir Ws., Ach. et al., ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University